



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ISMAIL
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
3. NHK : 425139

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 800.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/120 m2 di KAB / KOTA AGAM, Rp. 200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/210 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 145.400.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO GT SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA VELOZ MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
3. MOTOR, HONDA RODA 2 Tahun 2016, HIBAH TANPA AKTA Rp. 5.000.000
4. LAINNYA, PASIFIC SEPEDA Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 400.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 3.550.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 12.203.449

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 961.153.449

III. HUTANG Rp. 840.746.252

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 120.407.197

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.